***Policy Brief* (Kajian Ringkas)**

APBN BERKUALITAS[1]

Oleh
Bambang Juanda & Tim DJA Kemenkeu

1. Latar Belakang

Dalam pembangunan nasional, peran pemerintah sangat penting. Kemampuan pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan publik akan menentukan arah pembangunan masyarakat dan perkembangan perekonomian sebuah negara. Peran pemerintah akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat apabila kebijakan tersebut tepat sasaran dalam menuntaskan permasalahan yang ada diantara masyarakat. Untuk mencapai sasaran yang efektif pada setiap kebijakan dibutuhkan manajemen yang baik dalam pengelolaan kebijakan tersebut. Manajemen kebijakan tersebut secara makro dapat dilihat dari pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurut UU RI nomor 20 tahun 2019 (tentang APBN), APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu anggaran tersebut difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan APBN harus dijalankan dengan prinsip demokrasi, kebersamaan, berkeadilan, efisiensi dan berkelanjutan. Dalam UU APBN juga dijelaskan bahwa suatu pengelolaan belanja negara diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penurunan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

APBN yang berkualitas secara tidak langsung dijabarkan dalam buku infomasi APBN 2017, sebagai APBN yang mampu menyelesaikan permasalahan suatu bangsa dan dijalankan secara efisien. Bila dilihat dari sisi pengelolaan keuangan, maka APBN berkualitas

[1] Dipresentasikan di Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI pada 3 Desember 2019

diharapkan dapat tercapai bila memenuhi asas pengelolaan keuangan negara seperti yang tercantum dalam UU no 17, pasal 3 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara. Dalam APBN juga terdapat anggaran belanja yang dialokasikan kepada daerah dan desa untuk digunakan dalam pembangunan setiap wilayah. Anggaran belanja transfer daerah tersebut juga harus dikelola secara baik yang didasarkan pada UU no 58, pasal 4(1) tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang juga memiliki kriteria normatif yang serupa dengan UU no 17, yaitu pengelolaan uang yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Oleh karenanya secara mikro di tingkat daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa diperlukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD dan APBDes) yang berkualitas juga.

Sampai saat ini, belum ada definisi APBN berkualitas yang konkrit dan terukur. Belum adanya definisi yang konkrit dan terukur ini menyebabkan kita tidak mempunyai acuan (*benchmarking*), misalnya dalam masalah tentang:

1. bagaimana besaran alokasi untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), belanja non K/L serta belanja transfer ke daerah dan desa;
2. bagaimana besaran alokasi untuk belanja K/L terkait urusan wajib pelayanan dasar (SPM) dan selain urusan wajib pelayanan dasar;
3. bagaimana besaran alokasi menurut jenis belanja pegawai, barang, modal, subsidi, hibah, bantuan sosial dan lainnya;
4. Jenis dana transfer mana yang perlu ditingkatkan (prioritaskan) atau dikurangi, yang tentu saja harus memperhatikan wilayah di Indonesia yang sangat beragam;
5. Bagaimana menentukan target pendapatan dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
6. Jika total belanja yang dianggarkan melebihi target penerimaan (defisit), jenis sumber pembiayaan apa yang akan dilakukan, apakah melalui pembiayaan Utang (via SBN atau pinjaman) atau lainnya.
7. Apakah Utang Indonesia selama ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas atau cenderung memicu pemerintah dalam kondisi gagal bayar karena

beban utang yang tinggi akan membatasi ruang gerak fiscal (*fiscal space*) di masa yang akan datang

Identifikasi masalah di atas sangat penting untuk dikaji dalam rangka mendukung APBN yang berkualitas yang sampai saat ini belum ada definisi yang konkrit dan juga bagaimana mengukurnya. Kajian ini harus diawali dengan bagaimana membuat suatu definisi APBN yang berkualitas yang ringkas tapi jelas sehingga mudah mengevaluasinya dan mudah dalam memberikan rekomendasi kebijakan dalam pengelolaan APBN yang lebih berkualitas di masa yang akan datang.

2. Rumusan dan Batasan Masalah serta Tujuan Kajian (*Policy Brief*)

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana definisi APBN berkualitas?
2. Aspek apa saja yang dikaji dalam APBN berkualitas?
3. Bagaimana cara mengukur APBN berkualitas?
4. Regulasi pengelolaan keuangan negara apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas APBN? Apakah prosedur yang diatur dalam regulasi-regulasi tersebut saling mendukung, menghambat atau justru menimbulkan ketidakjelasan dalam menyusun APBN?
5. Bagaimana rekomendasi dan upaya yang harus dilakukan agar pengelolaan keuangan negara dapat memberikan dampak yang baik bagi terwujudnya APBN berkualitas?

Pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas merupakan batasan ruang lingkup penelitian ini. Mengingat cakupan regulasi sangat luas dan waktunya terbatas maka kajian ini difokuskan atau dibatasi pada permasalahan nomor 1, 2, 3 dan 5 saja.

Untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut, diperlukan suatu kajian ringkas (*policy brief*) dengan tujuan, antara lain :

1. Mengkaji definisi APBN berkualitas.
2. Mengkaji aspek apa saja yang dikaji dalam APBN berkualitas
3. Mengkaji ukuran atau cara mengukur APBN berkualitas

4. Memberikan rekomendasi dan upaya yang harus dilakukan agar pengelolaan keuangan negara dapat memberikan dampak yang baik bagi terwujudnya APBN berkualitas?

3. Pengembangan Definisi APBN Berkualitas

Dalam APBN KITA (edisi Juni 2019) dijelaskan bahwa reformasi ekonomi didukung oleh kebijakan fiskal yang **responsif dan efektif**, dengan tetap menjaga APBN tetap sehat dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, kebijakan fiskal tahun 2020 mengangkat tema **"APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia".** Tema ini selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, **yaitu "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas".**

Kebijakan fiskal diarahkan untuk menstimulasi perekonomian sehingga dapat tumbuh pada level yang cukup tinggi (menggairahkan investasi dan ekspor, mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM, serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural). **APBN didorong agar makin sehat,** ditunjukkan dengan level pendapatan yang makin optimal, **belanja yang lebih berkualitas, serta pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan**. Tidak hanya itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk **perbaikan neraca pemerintah** yang ditandai dengan peningkatan aset, terkendalinya liabilitas, dan peningkatan ekuitas.

Kebijakan APBN **terarah** dalam menjalankan fungsi **alokasi, distribusi, dan stabilisasi**. APBN yang terukur artinya **defisit APBN dijaga** pada level yang tepat sehingga terjaga kesinambungannya.

Belanja negara perlu dialokasikan dan direncanakan secara baik agar **output/outcome menjadi jelas dan nyata**. Berbagai program dan kegiatan yang beririsan perlu disinergikan agar lebih efektif dalam pencapaian sasaran dan lebih efisien. Belanja negara bukan hanya diarahkan untuk mendorong **pertumbuhan ekonomi** semata tetapi juga untuk melakukan **pemerataan** pembangunan. **Pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, serta peningkatan daya beli** terus

diupayakan. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan belanja untuk menjaga **stabilitas** dan **antisipasi ketidakpastian termasuk untuk mitigasi risiko bencana alam**.

Pemerintah mendorong belanja yang lebih berkualitas, atau *spending better*. Hal ini dilaksanakan melalui penghematan belanja barang secara masif, **penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai**, peningkatan efektivitas termasuk **ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan belanja transfer ke daerah dan dana desa**.

Sesuai tema kebijakan fiskal 2020, penguatan alokasi anggaran program prioritas akan difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia, perlindungan sosial yang komprehensif, pembangunan infrastruktur, peningkatan **kualitas desentralisasi fiskal**, dan **reformasi institusional yang mendukung akselerasi daya saing dan perbaikan keseimbangan eksternal atau neraca pembayaran**.

Sampai saat ini **belum ada** literatur yang menjelaskan **definisi APBN berkualitas** yang ringkas dan jelas serta menjelaskan bagaimana cara mengukurnya sehingga mudah mengevaluasinya dan mudah dalam memberikan rekomendasi kebijakan dalam pengelolaan APBN yang lebih berkualitas di masa yang akan datang. Saat ini yang ada adalah definisi Juanda *et al* (2014) tentang belanja berkualitas (*quality spending*), yaitu ***Belanja Berkualitas adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan dan akuntabel.*** Definisi ini sudah diterapkan dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruh kualitas belanja dan juga **perbedaan kualitas belanja antar provinsi di Indonesia serta perkembangan kualitas belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan Lampung.**

Bagaimana dengan atribut pendapatan dan belanja (APBN) Berkualitas? Bila dilihat dari sisi pengelolaan keuangan, maka APBN berkualitas diharapkan dapat tercapai bila memenuhi asas pengelolaan keuangan negara seperti yang tercantum dalam UU no 17, pasal 3 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara, yaitu keuangan negara dikelola secara **tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, *efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab*** dengan memperhatikan rasa **keadilan dan**

kepatutan. Dengan demikian dari sisi belanja berkualitas, sebagaimana yang dinyatakan Juanda *et al* (2014), mempunyai atribut-atribut sebagai berikut:

1. Belanja yang tertib
2. Belanja yang taat pada peraturan perundang-undangan
3. Belanja yang efisien
4. Belanja yang ekonomis
5. Belanja yang efektif
6. Belanja yang transparan
7. Belanja yang dapat dipertanggungawabkan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Definisi dan kajian bagaimana mengukur APBN berkualitas ini belum pernah ada di Indonesia. Akan tetapi dari uraian terkait dengan kebijakan fiskal dan berbagai atribut APBN berkualitas, kerangka untuk definisi APBN berkualitas ini dapat dilihat dalam Gambar 1 yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka terkait dengan aspek-aspek APBN berkualitas yang diuraikan sebelumnya. Kerangka acuan ini dikembangkan dari definisi belanja berkualitas dalam Juanda *et al* (2014).

Penyusunan APBN berkualitas ini dapt dimulai dari **prioritas nasional**, misalnya dalam dokumen RPJMN (5 tahunan) dan RKP (1 tahunan) yang menghasilkan suatu tema kebijakan fiskal (misalnya untuk tahun 2020 adalah "APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia"). Indikator *output/outcome* prioritas nasional yang ingin dicapai misalnya peningkatan **pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan ketimpangan, peningkatan produktivitas, serta peningkatan daya beli.** Ukurannya juga sekarang sudah makin jelas, sebagaimana tercantum dalam UU APBN 2020, Pasal 46 yang menyatakan bahwa pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2020 mengupayakan pemenuhan **sasaran pembangunan yang berkualitas**, yaitu dalam bentuk:

a) penurunan kemiskinan menjadi 8,5% - 9,0%;
b) tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,8% - 5,0%;
c) penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,375 - 0,380; dan

d) peningkatan Indeks Pembangunan Manusia mencapai 72,51

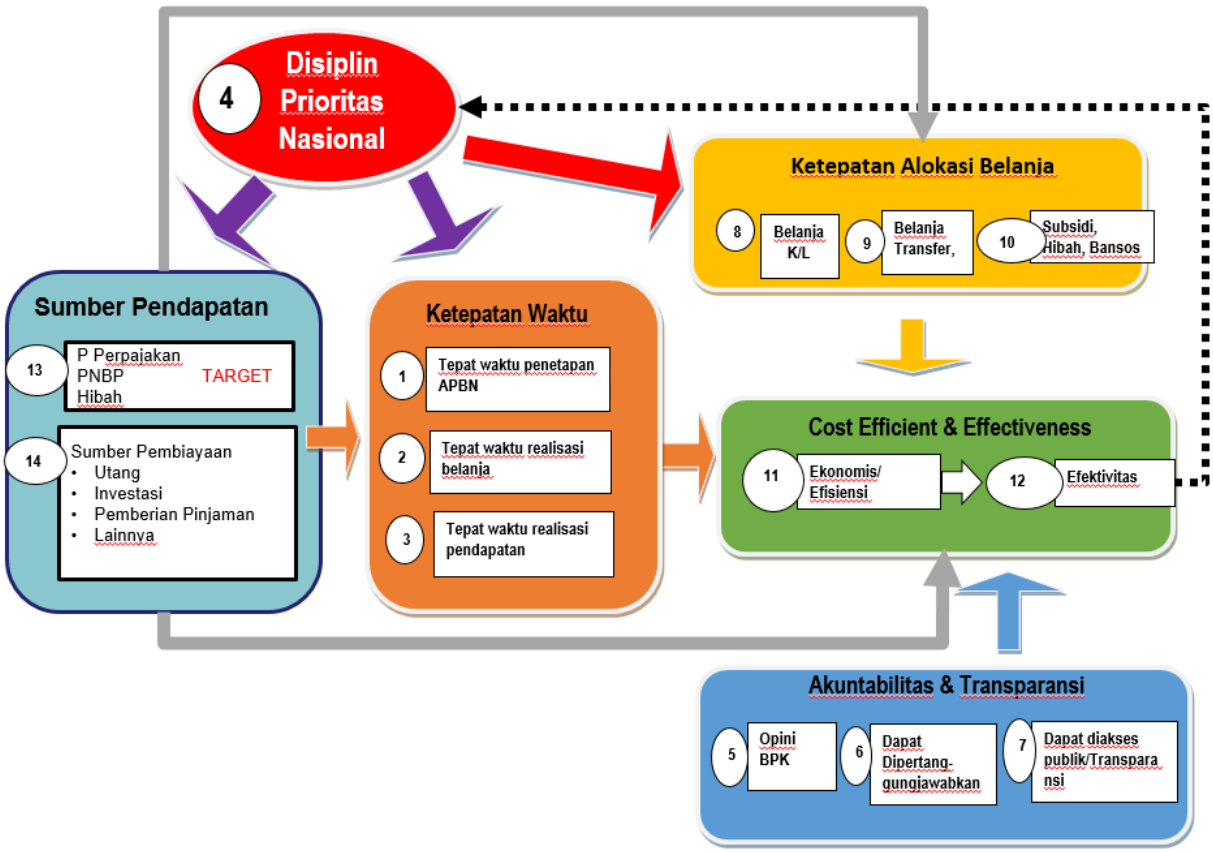

Gambar 1. Kerangka Acuan Definisi APBN Berkualitas

Untuk **mencapai sasaran pembangunan berkualitas** pada Tahun 2020 tersebut **perlu alokasi belanja yang tepat** (bekualitas juga). Sebagai contoh, dibandingkan RKP 2018 sebanyak 11 Prioritas Nasional, dalam RKP 2019 sudah terjadi penajaman menjadi 5 Prioritas Nasional (PN). Sesuai prinsip ***money follows program***, untuk mencapai 5 PN tersebut disusun 24 Program Prioritas (PP) dan 102 Kegiatan Prioritas (KP). Tiap tahun RKP ini dievaluasi, misalnya pada akhir tahun 2019, RKP 2019 dievaluasi untuk naskah Perpres RKP 2021.

Hasil evaluasi RKP yang dilakukan Bappenas biasanya dalam bentuk **indeks komposit kinerja prioritas nasional** (IK). Penyusunan konsep Evaluasi RKP yang

dilakukan secara berjenjang (*bottom-up*) mulai dari sasaran KP, kemudian diagregat ke level PP, hingga PN. Indeks komposit kinerja prioritas nasional (IK) merupakan gabungan capaian sasaran PN (sebagai *outcome*, dalam %) dan capaian sasaran PP-KP (sebagai dukungan *output*nya, dalam %). **Efektifitas** pencapaian sasaran PN merupakan **perbandingan antara realisasi dengan target sasaran PN** yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan pencapaian sasaran PP dan KP, sekarang sudah lebih tajam daripada RKP 2018 karena tiap PP dalam RKP 2019 bukan hanya terdiri dari beberapa KP tapi juga mempunyai sasaran PP, dan tiap KP mempunya Sasaran juga. Oleh karena **PP dan KP sekarang mempunyai sasaran, maka lebih mudah untuk mengevaluasi efektifitasnya**.

Alokasi belanja juga harus dilakukan secara efisien sebagaimana dalam kerangka acuan di Gambar 1. Ukuran efisiensi biasanya mengukur suatu rasio bagaimana besaran output yang dihasilkan oleh alokasi input yang digunakan. Dalam ilustrasi disini ada beberapa output (**4 sasaran pembangunan yang berkualitas** dalam APBN 2020) dan banyak input (alokasi belanja) yang dapat diklasifikasikan dan dikelompokkan misalnya:

a. **alokasi belanja berdasarkan Kementerian/Lembaga** (K/L) dan Belanja Transfer. Lihat Gambar 2.1. Karena sekarang ada 86 K/L dan data series terbatas maka saat ini yang dibahas berdasarkan klasifikasi lainnya;
b. **alokasi belanja berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar** (SPM), Non-SPM serta Belanja Transfer. Lihat Gambar 2.2;
c. **alokasi menurut jenis belanja** seperti: pegawai, barang, modal, subsidi, hibah, social dan lain-lain. Lihat Gambar 2.3;

Salah satu mengukur **efisiensi dan juga secara tidak langsung mengukur efektifitas**, dapat dilihat dari bagaimana **pengaruh dari masing-masing belanja tersebut terhadap masing-masing dari 4 sasaran pembangunan berkualitas**. Pengaruh dari masing-masing belanja ini dapat dilihat **dari koefisien model ekonometrik** yang dibahas dalam bagian berikutnya. Hasil dugaan koefisien model ekonometrik dapat dijadikan justifikasi alokasi belanja dalam APBN selama ini, apakah berkualitas atau tidak.

Dalam Gambar 1 terlihat bahwa efisiensi dan efektifitas belanja ini tergantung juga dari **ketepatan waktu** dalam realisasi pendapatan, realisasi belanja dan juga dalam

penetapan APBN. Dalam realisasi pendapatan, pemerintah juga harus dapat mengoptimalkan pendapatannya, baik dari penerimaan negara pajak (PNP) maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah.

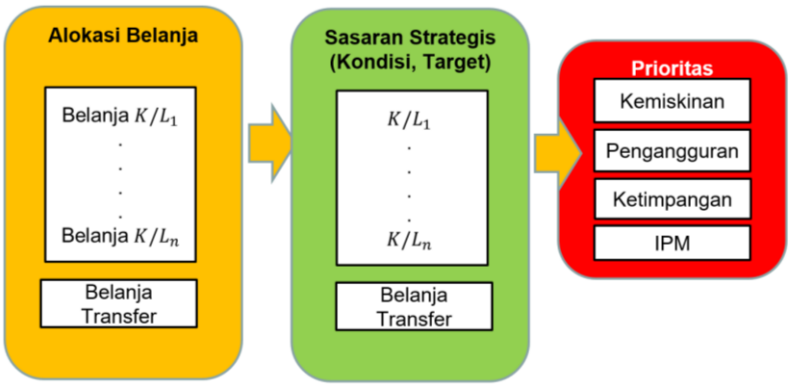

Gambar 2.1 Alokasi Belanja Berdasarkan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Belanja Transfer

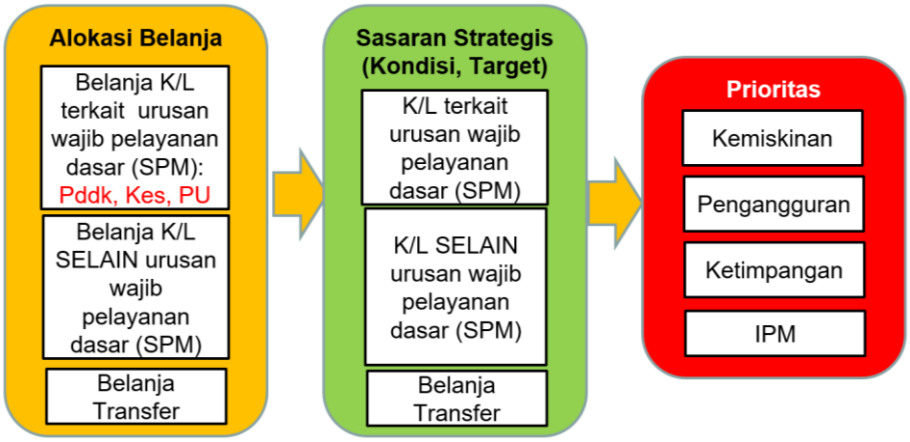

Gambar 2.2 Alokasi Belanja Berdasarkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar (SPM), Non-SPM Serta Belanja Transfer

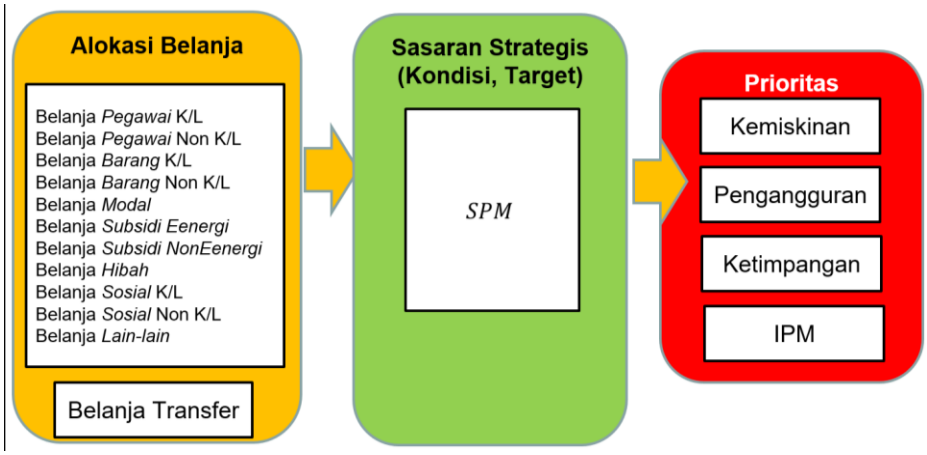

Gambar 2.3 Alokasi **menurut jenis** Belanja

Dalam Gambar 1 terlihat juga bahwa efisiensi dan efektifitas belanja ini tergantung juga dari pengelolaan keuangan negara yang **transparan dan akuntabel**. Pemerintah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat (transparansi) serta mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya atau keuangannya (akuntabilitas). Ukuran yang mudah dilihat adalah dari Opini BPK tentang pengelolaan keuangannya.

Dalam rangka membiayai pembangunan untuk mencapai 4 sasaran pembangunan berkualitas, pemerintah membutuhkan anggaran belanja yang relatif besar. Disisi lain, Indonesia masih tergolong dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah sehingga pendapatannya masih dibawah belanja yang dibutuhkan untuk mencapai prioritas pembangunan berkualitas. Kondisi belanja yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan menyebabkan APBN di Indonesia selalu mengalami defisit. **Kondisi defisit tersebut menyebabkan pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lain**. Beberapa cara untuk menutupi defisit anggaran antara lain dengan melakukan utang atau menjual asset/privatisasi. Dari beberapa alternatif pembiayaan tersebut, yang paling lazim dan sering dilakukan pemerintah di suatu negara yaitu dengan melakukan utang baik **utang dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan melalui peminjaman langsung maupun melalui surat utang pemerintah**.

Penggunaan utang harus di perhatikan karena saat utang meningkat, maka akan terjadi peningkatan pembayaran bunga utang yang berimplikasi pada peningkatan beban pengeluaran pemerintah. **Utang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui berbagai kegiatan produktif**, baik dari sisi permintaan aggregate (AD) maupun penawaran aggregate (AS). Jika utang mempengaruhi alokasi belanja atau pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif, maka akan **mendorong peningkatan output** melalui penawaran agregat, dan akhirnya akan **meningkatkan potensi penerimaan pemerintah** yang dapat digunakan untuk **membayar utang dan bunganya**.

Selain perkembangan kondisi defisit anggaran, dan rasio utang pemerintah terhadap GDP, ada indikator lain yang dapat menunjukan kondisi keberlanjutan utang yaitu melalui keseimbangan primer. **Keseimbangan primer merupakan salah satu indikator yang**

digunakan oleh berbagai peneliti untuk melihat kondisi keberlanjutan utang suatu negara. Keseimbangan primer adalah penerimaan negara dikurangi dengan seluruh belanja negara di luar dari belanja bunga utang. Ketika kondisi keseimbangan primer suatu negara dalam posisi defisit, terdapat indikasi bahwa utang pemerintah digunakan untuk menutupi utang pada periode sebelumnya. Yang penting disini adalah **apakah perkembangan keseimbangan primernya membaik (cenderung naik) atau memburuk (cenderung turun)**.

Dari uraian kerangka acuan APBN berkualitas yang diringkaskan dalam Gambar 1, kita dapat mendefinisikan secara ringkas bahwa APBN berkualitas adalah ***APBN yang mengoptimalkan pendapatan, dan belanjanya dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan nasional yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu (realisasi pendapatan dan belanja), transparan dan akuntabel*.**

4. Model Ekonometrika untuk Melihat Pengaruh Belanja terhadap 4 Sasaran Pembangunan Berkualitas

Sebagaimana dijelaskan bagian sebelumnya, alokasi menurut jenis belanja harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk mencapai 4 sasaran pembangunan yang berkualitas yaitu penurunan kemiskinan (Pov), tingkat pengangguran terbuka (Unemp); ketimpangan (IW atau Gini Ratio), dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu pendekatan untuk mengukur ini adalah dilihat dari koefisien model ekonometrika. Data yang digunakan untuk Analisis ini dalam periode Tahun 2005 2017.

4.1 Pengaruh Belanja terhadap Penurunan Kemiskinan

Misalnya dari Gambar 2.3 untuk melihat pengaruh secara terpisah realisasi anggaran masing-masing jenis belanja terhadap pengurangan kemiskinan (tanpa memperhatikan faktor lainnya) dapat dilihat dari model (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) apakah dugaan koefisiennya signifikan secara statistik. Angka dalam tanda kurung yang berada dibawah koefisien regresi adalah nilai-p. Nilai-p ini dapat diinterpretasikan sebagai peluang (risiko) kesalahan dalam menyimpulkan H_1 ($\beta \neq 0$)**,** bahwa koefisien variabel penjelas tersebut tidak

sama dengan nol atau jenis belanja tersebut berpengaruh nyata. Artinya, meskipun kita menyimpulkan H_1, tapi mungkin saja H_0 yang benar (tidak berpengaruh nyata). kriteria uji menggunakan taraf nyata α, misal 5%, yaitu kesalahan maksimum ketika memutuskan H_1 adalah sebagai berikut:

Jika $p > \alpha$ maka terima H_0 (kesalahannya > batas taraf nyata jika terima H_1),

Jika $p < \alpha$ maka terima H_1 (kesalahannya < batas taraf nyata jika terima H_1).

Jadi pada dasarnya tergantung konteks permasalahan, apakah dengan risiko kesalahan sebesar nilai-p tersebut kita berani menyimpulkan H_1.

$Pov_t = 64.24 - 4.263\ LnBP_t + \varepsilon_t$ Adj-$R^2 = 0.8948$ (1)
(.00)* (.00)*

$Pov_t = 51.46 - 3.29\ LnBB_t + \varepsilon_t$ Adj-$R^2 = 0.8800$ (2)
(.00)* (.00)*

$Pov_t = 58{,}82 - 3{,}94\ LnBM_t + \varepsilon_t$ Adj-$R^2 = 0.8125$ (3)
(.00)* (.00)*

$Pov_t = 66.61 - 2.21\ LnBM_t - 2.42\ LnBM_{t-1} + \varepsilon_t$ Adj-$R^2 = 0.9190$ (4)
(.00)* (.08)* (.03)*

$Pov_t = 58.23 - 4.08\ LnBBS_t + \varepsilon_t$ Adj-$R^2 = 0.3349$ (5)
(.01)* (.02)*

$Pov_t = 30.83 - 3.31\ LnSTotal_t + \varepsilon_t$ Adj-$R^2 = 0.2619$ (6)
(.00)* (.04)*

Dilihat dari R^2 terkoreksi atau tingkat akurasi peramalan untuk model secara terpisah, jenis belanja yang memberikan kontribusi keragaman tingkat kemiskinan paling besar adalah belanja modal (BM), belanja pegawai (BP), belanja barang (BB), belanja barang (BB), belanja bantuan sosial (BBS), belanja subsidi total (STotal) yaitu berturut-turut nilainya 91.9%, 89.48%, 88%, 33.49%, dan 26.19%.

Sedangkan kalau dilihat elastisitasnya, dalam pengertian bahwa jika belanja tersebut dinaikkan 1 persen maka yang menyebabkan penurunan persentase kemiskinan yang paling besar urutannya adalah belanja pegawai (-0.0426), belanja bantuan sosial (-0.0408), belanja barang (-0.0329), belanja subsidi total (-0.0331), dan belanja modal (-0.0221). Untuk

belanja modal masih berpengaruh pada waktu berikutnya dengan elastisitas -0.0241. Jadi secara total, belanja modal sebenarnya paling berperan.

Untuk melihat pengaruh realisasi anggaran menurut jenis belanja secara bersama-sama terhadap pengurangan kemiskinan dapat dilihat dari model (7). Angka dalam tanda kurung yang berada dibawah koefisien regresi adalah nilai-p. Untuk yang diberi tanda *(kuning) adalah nilai-p untuk uji eka arah (*one-way test*), yang mana H_1 lebih jelas bahwa koefisiennya negatif ($\beta<0$). Artinya bahwa jika belanja tersebut dinaikkan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Nilai-p nya sekitar setengah dari nilai-p untuk uji dwi-arah (*two-way test*), yang mana H_1 ($\beta\neq0$). Hasil analisis model regresi yang lengkap dengan menggunakan *software* STATA dapat dilihat dalam Tabel 1.

$$\underset{(.00)^*}{Pov_t = 70.6} \underset{(.055)^*}{-3.34\ LnBP_t} \underset{(.035)^*}{-3.08\ LnBB_t} \underset{(0.06)}{+2.08\ LnBM_t} \underset{(0.22)}{+0.74\ LnBM_{t-1}} \underset{(0,16)^*}{-0.73\ LnBBS_t}$$

$$\underset{(.05)^*}{-1.14\ LnSTot_t} + \varepsilon_t \qquad R^2 = 0.99 \qquad (7)$$

Pov_t = Tingkat kemiskinan (%)

BP_t = Belanja pegawai pada tahun t (Milyar Rp)

BB_t = Belanja Barang pada tahun t (Milyar Rp)

BM_t = Belanja Modal pada tahun t (Milyar Rp)

BBS_t = Belanja Bantuan Sosial pada tahun t (Milyar Rp)

BM_{t-1} = Belanja Modal pada tahun t-1 (Milyar Rp)

$STot_t$ = Subsidi Total pada tahun t (Trilyun Rp)

ε = Error term

t = Waktu (tahun)

Jenis belanja yang dapat menurunkan Kemiskinan (dengan urutan elastisitasnya) adalah belanja pegawai (-.0334), belanja barang (-.0308), belanja subsidi total (-.0114), belanja bantuan sosial (-.0073). Belanja modal sebenarnya berkorelasi negatif dengan kemiskinan, tapi karena masalah multikolinear, koefisiennya tidak signifikan dan arahnya berlawanan.

Indikasi adanya multikolinearitas dapat dilihat dalam Tabel 2. Koefisien korelasi antar jenis belanja signifikan, dilihat dari nilai-p yang ditampilkan dibawah angka koefisien korelasi tersebut. Artinya dalam menginterpretasi koefisien model atau elastisitas, tidak dapat secara parsial dengan asumsi *ceteris paribus*. Dengan pengertian lain, kita tidak dapat menginterpretasikan pengaruh belanja modal untuk mengurangi kemiskinan dengan asumsi faktor belanja lainnya tetap. Jadi dapat mengacu kembali pengaruh belanja modal tersebut di model (4).

Table 1. Hasil Analisis Model Regresi Untuk Respons Tingkat Kemiskinan

```
Linear regression                               Number of obs     =         12
                                                F(6, 5)           =     182.76
                                                Prob > F          =     0.0000
                                                R-squared         =     0.9909
                                                Root MSE          =     .35215

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
         POV |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        LnBP |  -3.335017   1.717986    -1.94   0.110     -7.75124    1.081207
        LnBB |  -3.077695   1.345738    -2.29   0.071    -6.537025    .3816347
             |
        LnBM |
         --. |   2.083949   .8397077     2.48   0.056    -.0745879    4.242487
         L1. |   .7421275   .5268165     1.41   0.218    -.6120973    2.096352
             |
       LnBBS |  -.7289007   .6696089    -1.09   0.326    -2.450185    .9923837
    LnSTotal |  -1.137449   .5843618    -1.95   0.109    -2.639599    .3647009
       _cons |   70.60064   8.517756     8.29   0.000     48.70505    92.49623
------------------------------------------------------------------------------
```

Dari Tabel 2 tersebut terlihat bahwa korelasi semua jenis belanja (BP, BB, BM, BBS, STotal) sebenarnya **berkorelasi negatif signifikan** dengan tingkat kemiskinan (POV) sebagaimana dalam model (1), (2), (3), (4), (5) dan (6).

4.2 Pengaruh Belanja terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran

Untuk melihat pengaruh secara terpisah realisasi anggaran masing-masing jenis belanja terhadap pengurangan tingkat pengangguran (%), tanpa memperhatikan faktor lainnya, dapat dilihat dari model (8), (9), (10), (11) dan (12) apakah dugaan koefisiennya

signifikan secara statistik. Angka dalam tanda kurung yang berada dibawah koefisien regresi adalah nilai-p.

Table 2. Koefisien Korelasi Antar Jenis Belanja dan Tingkat Kemiskinan

	POV	LnBP	LnBB	LnBM	L.LnBM	LnBBS	LnSTotal
POV	1.0000						
LnBP	-0.9506	1.0000					
	0.0000						
LnBB	-0.9434	0.9920	1.0000				
	0.0000	0.0000					
LnBM	-0.9100	0.9754	0.9741	1.0000			
	0.0000	0.0000	0.0000				
L.LnBM	-0.9514	0.9679	0.9436	0.9207	1.0000		
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
LnBBS	-0.6247	0.7013	0.6540	0.7299	0.5196	1.0000	
	0.0224	0.0076	0.0153	0.0046	0.0834		
LnSTotal	-0.5687	0.5281	0.4532	0.5514	0.4760	0.7012	1.0000
	0.0426	0.0636	0.1199	0.0508	0.1177	0.0076	

Model pengaruh masing-masing jenis belanja terhadap indikator tingkat pengangguran (tanpa memerhatikan faktor lainnya) adalah sebagai berikut**:**

$$Unemp_t = \underset{(0,00)^*}{46,16} - \underset{(0,00)^*}{3,23}\ LnBP_t + \varepsilon_t \qquad Adj\text{-}R^2 = 0.9602 \qquad (8)$$

$$Unemp_t = \underset{(0,00)^*}{36,19} - \underset{(0,00)^*}{2,48}\ LnBB_t + \varepsilon_t \qquad Adj\text{-}R^2 = 0.9257 \qquad (9)$$

$$Unemp_t = \underset{(0,00)^*}{44,21} - \underset{(0,067)^*}{1,385}\ LnBM_t - \underset{(0,011)^*}{1,818}\ LnBM_{t-1} + \varepsilon_t \qquad Adj\text{-}R^2 = 0.9403 \qquad (10)$$

$$Unemp_t = \underset{(0,002)^*}{44,63} - \underset{(0,007)^*}{3,37}\ LnBBS_t + \varepsilon_t \qquad Adj\text{-}R^2 = 0.4472 \qquad (11)$$

$$Unemp_t = \underset{(0,002)^*}{21,41} - \underset{(0,025)^*}{2,63}\ LnSTotal_t + \varepsilon_t \qquad Adj\text{-}R^2 = 0.3223 \qquad (12)$$

Dilihat dari R^2 terkoreksi atau tingkat akurasi peramalan untuk model secara terpisah, jenis belanja yang memberikan kontribusi keragaman tingkat pengangguran paling besar adalah belanja pegawai (BP), belanja modal (BM), belanja barang (BB), belanja barang (BB), belanja bantuan sosial (BBS), belanja subsidi total (STotal) yaitu berturut-turut nilainya 96.02%, 94.03%, 92,57%, 44.72%, dan 32.23%.

Sedangkan kalau dilihat elastisitasnya, dalam pengertian bahwa jika belanja tersebut dinaikkan 1 persen maka yang menyebabkan penurunan persentase pengangguran yang paling besar urutannya adalah belanja bantuan sosial (-0.0337), belanja pegawai (-0.0323), belanja modal (-0.01385), belanja subsidi total (-0.0331), dan belanja barang (-0.0248). Untuk belanja modal masih berpengaruh pada waktu berikutnya dengan elastisitas -0.0182. Jadi secara total, belanja modal sebenarnya lebih berperan daripada belanja barang.

Untuk melihat pengaruh realisasi anggaran menurut jenis belanja secara bersama-sama terhadap pengurangan tingkat pengangguran dapat dilihat dari dua model alternatif (13a dan 13b). Angka dalam tanda kurung yang berada dibawah koefisien regresi adalah nilai-p. Hasil analisis model regresi yang lengkap dengan menggunakan *software* STATA dapat dilihat dalam Tabel 3.

$$\underset{\text{(0,00)*}}{Unemp_t = 52{,}21} \underset{\text{(0,294)}}{- 2{,}24\ LnBP_t} \underset{\text{(0,610)}}{- 0{,}58\ LnBB_{t-1}} \underset{\text{(0,75)}}{- 1{,}54\ LnBM_{t-1}} \underset{\text{(0,008)}}{- 0{,}85\ LnBBS_t} + \varepsilon t$$

$$R\text{-sq} = 0.9837 \qquad (13.a)$$

$$\underset{\text{(0,00)}}{Unemp_t = 53{,}48} \underset{\text{(0,012)*}}{- 3{,}92\ LnBP_t} + \underset{\text{(0,566)}}{0{,}46\ LnBB_{t-1}} \underset{\text{(0,762)}}{- 0{,}11\ LnBBS_t} \underset{\text{(0,03)}}{- 0{,}59\ LnSTotal_t} + \varepsilon t$$

$$\mathbf{R\text{-sq} = 0.9923} \qquad (13.b)$$

Jenis belanja yang dapat menurunkan tingkat pengangguran (dengan urutan elastisitasnya) adalah bantuan pegawai (-.0392), belanja bantuan sosial (-.008), belanja subsidi total (-.0059). Belanja barang dan belanja modal sebenarnya berpengaruh signifikan mengurangi tingkat pengangguran seperti dalam model (9 dan 10), tapi karena masalah multikolinear, koefisiennya tidak signifikan dan arahnya kadangkala berlawanan.

Indikasi adanya multikolinearitas dapat dilihat dalam Tabel 4. Koefisien korelasi antar jenis belanja signifikan, dilihat dari nilai-p yang ditampilkan dibawah angka koefisien

korelasi tersebut. Artinya dalam menginterpretasi koefisien model atau elastisitas, tidak dapat secara parsial dengan asumsi *ceteris paribus*. Dengan pengertian lain, kita tidak dapat menginterpretasikan pengaruh belanja barang dan belanja modal untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan asumsi faktor belanja lainnya tetap. Jadi dapat mengacu kembali pengaruh belanja barang dan belanja modal tersebut di model (9 dan 10).

Table 3a. Hasil Analisis Model (13a) Untuk Respons Tingkat Pengangguran

```
Linear regression                               Number of obs     =         12
                                                F(4, 7)           =     818.00
                                                Prob > F          =     0.0000
                                                R-squared         =     0.9837
                                                Root MSE          =     .27515
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
       UNEMP |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        LnBP |  -2.244908   1.983102    -1.13   0.295      -6.9342    2.444383
             |
        LnBB |
         L1. |  -.5867433    1.10047    -0.53   0.610    -3.188942    2.015455
             |
        LnBM |
         L1. |   -.154208   .4657303    -0.33   0.750    -1.255485    .9470691
             |
       LnBBS |  -.8522037     .23237    -3.67   0.008    -1.401671    -.302736
       _cons |   52.21719   8.512526     6.13   0.000     32.08827    72.34612
------------------------------------------------------------------------------
```

Table 3b. Hasil Analisis Model (13b) Untuk Respons Tingkat Pengangguran

```
Linear regression                               Number of obs     =         12
                                                F(4, 7)           =     444.83
                                                Prob > F          =     0.0000
                                                R-squared         =     0.9923
                                                Root MSE          =     .18944

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
       UNEMP |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        LnBP |   -3.92056   1.164453    -3.37   0.012    -6.674053   -1.167067
             |
        LnBB |
         L1. |   .4693342   .7803364     0.60   0.566    -1.375868    2.314537
             |
       LnBBS |  -.1124733   .3573127    -0.31   0.762    -.9573835     .732437
    LnSTotal |  -.5979572   .2230737    -2.68   0.032    -1.125443   -.0704719
       _cons |   53.48223   4.794662    11.15   0.000     42.14466     64.8198
------------------------------------------------------------------------------
```

Table 4. Koefisien Korelasi Antar Jenis Belanja dan Tingkat Pengangguran

	UNEMP	LnBP	LnBB	LnBM	L.LnBM	LnBBS	LnSTotal
UNEMP	1.0000						
LnBP	-0.9816	1.0000					
	0.0000						
LnBB	-0.9653	0.9920	1.0000				
	0.0000	0.0000					
LnBM	-0.9497	0.9754	0.9741	1.0000			
	0.0000	0.0000	0.0000				
L.LnBM	-0.9631	0.9679	0.9436	0.9207	1.0000		
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
LnBBS	-0.7023	0.7013	0.6540	0.7299	0.5196	1.0000	
	0.0074	0.0076	0.0153	0.0046	0.0834		
LnSTotal	-0.6154	0.5281	0.4532	0.5514	0.4760	0.7012	1.0000
	0.0252	0.0636	0.1199	0.0508	0.1177	0.0076	

Dari Tabel 4 tersebut terlihat bahwa korelasi semua jenis belanja (BP, BB, BM, BBS, STotal) sebenarnya **berkorelasi negatif signifikan** dengan tingkat pengangguran (UNEMP) sebagaimana dalam model (8), (9), (10), (11) dan (12).

4.3 Pengaruh Belanja terhadap Penurunan Ketimpangan

Untuk melihat pengaruh secara terpisah realisasi anggaran masing-masing jenis belanja terhadap penurunan ketimpangan antar wilayah (tanpa memperhatikan faktor lainnya) dapat dilihat dari model (14), (15), (16), (17) dan (18) apakah dugaan koefisiennya signifikan secara statistik. Angka dalam tanda kurung yang berada dibawah koefisien regresi adalah nilai-p. Untuk yang diberi tanda *(kuning) adalah nilai-p untuk uji eka arah (*one-way test*), yang mana H_1 lebih jelas bahwa koefisiennya negatif ($\beta<0$).

$$LnIW_t = 0{,}19 - 0{,}043\ LnBP_t + \varepsilon_t \qquad \text{Adj-}R^2 = 0.9097 \qquad (14)$$
$$(0{,}002)^*\ (0{,}00)^*$$

$$LnIW_t = 0{,}059 - 0{,}033\ LnBB_t + \varepsilon_t \qquad \text{Adj-}R^2 = 0.8808 \qquad (15)$$
$$(0{,}168)\ (0{,}00)^*$$

$$LnIW_t = 0.138 - 0{,}006\ LnBM_t - 0{,}033\ LnBM_{t-1} + \varepsilon_t \quad \text{Adj-}R^2 = 0.8659 \quad (16)$$
$$(0{,}057)^* \quad (0{,}646) \quad (0{,}018)^*$$

$$LnIW_t = 0.168 - 0{,}044\ LnBBS_t + \varepsilon_t \quad \text{Adj-}R^2 = 0.4157 \quad (17)$$
$$(0{,}313) \quad (0{,}01)^*$$

$$LnIW_t = -0.181 - 0{,}0268\ LnSTotal_t + \varepsilon_t \quad \text{Adj-}R^2 = 0.1396 \quad (18)$$
$$(0{,}313) \quad (0{,}06)^*$$

Dilihat dari R^2 terkoreksi atau tingkat akurasi peramalan untuk model secara terpisah, jenis belanja yang memberikan kontribusi keragaman ketimpangan antar wilayah (IW) paling besar adalah belanja pegawai (BP), belanja barang (BB), belanja modal (BM), belanja bantuan sosial (BBS), belanja subsidi total (STotal) yaitu berturut-turut nilainya 90.97%, 88.08%, 86.59%, 41.57%, dan 13.96%.

Sedangkan kalau dilihat elastisitasnya, dalam pengertian bahwa jika belanja tersebut dinaikkan 1 persen maka yang menyebabkan penurunan ketimpangan antar wilayah yang paling besar urutannya adalah belanja bantuan sosial (-0.044), belanja pegawai (-0.043), belanja barang (-0.033), belanja subsidi total (-0.0268), dan belanja modal (-0.006). Untuk belanja modal masih berpengaruh pada waktu berikutnya dengan elastisitas -0.033. Jadi secara total, belanja modal sebenarnya berperan cukup besar, urutan ketiga, dalam menurunkan ketimpangan antar wilayah.

Untuk melihat pengaruh realisasi anggaran menurut jenis belanja secara bersama-sama terhadap pengurangan ketimpangan antar wilayah dapat dilihat dari model (19). Angka dalam tanda kurung yang berada dibawah koefisien regresi adalah nilai-p. Untuk yang diberi tanda *(kuning) adalah nilai-p untuk uji eka arah (*one-way test*), yang mana H_1 lebih jelas bahwa koefisiennya negatif ($\beta<0$). Artinya bahwa jika belanja tersebut dinaikkan maka akan menurunkan ketimpangan antar wilayah. Nilai-p nya sekitar setengah dari nilai-p untuk uji dwi-arah (*two-way test*), yang mana H_1 ($\beta\neq0$). Hasil analisis model regresi yang lengkap dengan menggunakan *software* STATA dapat dilihat dalam Tabel 5.

$$LnIW_t = 0{,}44 - 0.09\ LnBP_t + 0{,}05\ LnBB_{t-1} - 0.024\ LnBM_{t-1} + 0{,}002\ LnBBS_t + \varepsilon_t \quad (19)$$
$$(0{,}00)^* \quad (0{,}001)^* \quad (0{,}012) \quad (0{,}072)^* \quad (0{,}749)$$
$$\text{R-sq} = 0.9444$$

Dari dugaan model (19) dapat dilihat bahwa jenis belanja yang dapat menurunkan tingkat ketimpangan antar wilayah (dengan urutan elastisitasnya) adalah bantuan pegawai (-.09), dan belanja modal (-.024). Belanja barang dan belanja bantuan sosial dan belanja total subsidi sebenarnya berpengaruh signifikan mengurangi tingkat ketimpangan antar wilayah seperti dalam model (15, 17 dan 18), tapi karena masalah multikolinear, koefisiennya tidak signifikan dan arahnya kadangkala berlawanan.

Indikasi adanya multikolinearitas dapat dilihat dalam Tabel 6. Koefisien korelasi antar jenis belanja signifikan, dilihat dari nilai-p yang ditampilkan dibawah angka koefisien korelasi tersebut. Artinya dalam menginterpretasi koefisien model atau elastisitas, tidak dapat secara parsial dengan asumsi *ceteris paribus*. Dengan pengertian lain, kita tidak dapat menginterpretasikan pengaruh belanja barang dan belanja bantuan social untuk mengurangi tingkat ketimpangan dengan asumsi faktor belanja lainnya tetap. Jadi dapat mengacu kembali pengaruh belanja barang dan belanja bantuan sosial tersebut di model (15 dan 17).

Table 5. Hasil Analisis Model Untuk Respons Tingkat Ketimpangan (IW)

```
Linear regression                               Number of obs     =         12
                                                F(4, 7)           =     276.78
                                                Prob > F          =     0.0000
                                                R-squared         =     0.9444
                                                Root MSE          =     .00697
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
        LnIW |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        LnBP |  -.0907736    .016216    -5.60   0.001    -.1291182   -.0524289
             |
        LnBB |
         L1. |   .0501995   .0149291     3.36   0.012     .0148978    .0855012
             |
        LnBM |
         L1. |  -.0240562    .011355    -2.12   0.072    -.0509065    .0027941
             |
       LnBBS |   .0020621   .0061938     0.33   0.749     -.012584    .0167081
       _cons |   .4431779    .038316    11.57   0.000     .3525749    .5337809
------------------------------------------------------------------------------
```

Table 6. Koefisien Korelasi Antar Jenis Belanja dan Tingkat Ketimpangan Antar Wilayah (IW)

	LnIW	LnBP	LnBB	LnBM	L.LnBM	LnBBS
LnIW	1.0000					
LnBP	-0.9577	1.0000				
	0.0000					
LnBB	-0.9438	0.9920	1.0000			
	0.0000	0.0000				
LnBM	-0.9063	0.9754	0.9741	1.0000		
	0.0000	0.0000	0.0000			
L.LnBM	-0.9421	0.9679	0.9436	0.9207	1.0000	
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
LnBBS	-0.6814	0.7013	0.6540	0.7299	0.5196	1.0000
	0.0103	0.0076	0.0153	0.0046	0.0834	

Dari Tabel 6 tersebut terlihat bahwa korelasi semua jenis belanja yaitu belanja pegawai (BP), belanja barang (BB), belanja modal (BM), belanja bantuan sosial (BBS) dan belanja subsidi total (STotal) sebenarnya **berkorelasi negatif signifikan** dengan tingkat ketimpangan antar wilayah (IW) sebagaimana dalam model (14), (15), (16), (17) dan (18).

Dari Tabel 6 ini juga dapat disimpulkan bahwa pengaruh realisasi anggaran masing-masing jenis belanja terhadap penurunan ketimpangan antar wilayah signifikan. Hal ini berimplikasi bahwa instrument kebijakan desentralisasi fiskal seperti DAU dan juga DAK sudah dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah (IW). Akan tetapi pengaruh realisasi anggaran masing-masing jenis belanja tersebut terhadap penurunan ketimpangan antar individu (GINI) cenderung meningkatkan ketimpangan antar individu, sebagaimana hasil analisis korelasi di Tabel 7. Untuk ketimpangan individu memang tergantung juga pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja di daerahnya, apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini.

Table 7. Koefisien Korelasi Antar Jenis Belanja dan Tingkat Ketimpangan Antar Individu (GINI)

	LnGINI	LnBP	LnBB	LnBM	LnBBS	LnSTotal
LnGINI	1.0000					
LnBP	0.8491	1.0000				
	0.0002					
LnBB	0.8258	0.9920	1.0000			
	0.0005	0.0000				
LnBM	0.8674	0.9754	0.9741	1.0000		
	0.0001	0.0000	0.0000			
LnBBS	0.7569	0.7013	0.6540	0.7299	1.0000	
	0.0027	0.0076	0.0153	0.0046		
LnSTotal	0.7778	0.5281	0.4532	0.5514	0.7012	1.0000
	0.0017	0.0636	0.1199	0.0508	0.0076	

4.4 Pengaruh Belanja terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Untuk melihat pengaruh secara terpisah realisasi anggaran masing-masing jenis belanja terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (tanpa memperhatikan faktor lainnya) dapat dilihat dari model (20), (21), (22), (23) dan (24) apakah dugaan koefisiennya signifikan secara statistik. Angka dalam tanda kurung yang berada dibawah koefisien regresi adalah nilai-p. Untuk yang diberi tanda *(kuning) adalah nilai-p untuk uji eka arah (*one-way test*), yang mana H_1 lebih jelas bahwa koefisiennya positif ($\beta>0$).

$$LnIPM_t = 3{,}55 + 0{,}05\ LnBP_t + \varepsilon_t \qquad Adj\text{-}R^2 = 0.9434 \qquad (20)$$
$$(0{,}00)^*\ (0{,}00)^*$$

$$LnIPM_t = 3{,}71 + 0{,}04\ LnBB_t + \varepsilon_t \qquad Adj\text{-}R^2 = 0.9625 \qquad (21)$$
$$(0{,}00)^*\ (0{,}00)^*$$

$$LnIPM_t = 3{,}57 + 0{,}03\ LnBM_t + 0{,}02\ LnBM_{t-1} + \varepsilon_t \qquad Adj\text{-}R^2 = 0.9208 \qquad (22)$$
$$(0{,}00)^*\ (0{,}04)^* \qquad (0{,}05)^*$$

$$LnIPM_t = 3{,}70 + 0{,}04\ LnBBS_t + \varepsilon_t \qquad \text{Adj-}R^2 = 0.2444 \qquad (23)$$
$$(0{,}00)^* \quad (0{,}00)^*$$

$$LnIPM_t = 4{,}05 + 0{,}03\ LnSTotal_t + \varepsilon_t \qquad \text{Adj-}R^2 = 0.0805 \qquad (24)$$
$$(0{,}00)^* \quad (0{,}09)^*$$

Dilihat dari R^2 terkoreksi atau tingkat akurasi peramalan untuk model secara terpisah, jenis belanja yang memberikan kontribusi keragaman indeks pembangunan manusia (IPM) paling besar adalah belanja barang (BB), belanja pegawai (BP), belanja modal (BM), belanja bantuan sosial (BBS), belanja subsidi total (STotal) yaitu berturut-turut nilainya 96.25%, 94.34%, 92.08%, 24.44%, dan 08.05%.

Sedangkan kalau dilihat elastisitasnya, dalam pengertian bahwa jika belanja tersebut dinaikkan 1 persen maka yang menyebabkan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang paling besar urutannya adalah belanja pegawai (0.05), belanja bantuan sosial (0.04), belanja barang (0.04), belanja modal (0.03), dan belanja subsidi total (0.03). Untuk belanja modal masih berpengaruh pada waktu berikutnya dengan elastisitas 0.02. Jadi secara total, belanja modal sebenarnya berperan cukup besar, urutan pertama, dalam peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).

Untuk melihat pengaruh realisasi anggaran menurut jenis belanja secara bersama-sama terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dapat dilihat dari model (25). Angka dalam tanda kurung yang berada dibawah koefisien regresi adalah nilai-p. Untuk yang diberi tanda *(kuning) adalah nilai-p untuk uji eka arah (*one-way test*), yang mana H_1 lebih jelas bahwa koefisiennya negatif ($\beta>0$). Artinya bahwa jika belanja tersebut dinaikkan maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Nilai-p nya sekitar setengah dari nilai-p untuk uji dwi-arah (*two-way test*), yang mana H_1 ($\beta\neq0$). Hasil analisis model regresi yang lengkap dengan menggunakan *software* STATA dapat dilihat dalam Tabel 8.

$$LnIPM_t = 3{,}53 + 0.037\ LnBP_t + 0{,}013\ LnBM_t + 0.012\ LnBM_{t-1} - 0{,}013\ LnSTotal_t + \varepsilon_t \qquad (25)$$
$$(0{,}00) \quad (0{,}01)^* \qquad (0{,}10) \qquad (0{,}05)^* \qquad (0{,}01)$$
$$R\text{-sq} = 0.9841$$

Dari dugaan model (25) dapat dilihat bahwa jenis belanja yang dapat menaikkan indeks pembangunan manusia (dengan urutan elastisitasnya) adalah bantuan pegawai (0.03), dan belanja modal (0.01). Belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja total subsidi sebenarnya berpengaruh signifikan menaikkan indeks pembangunan manusia seperti dalam model (21, 23 dan 24), tapi karena masalah multikolinear, koefisiennya tidak signifikan dan arahnya kadangkala berlawanan.

Indikasi adanya multikolinearitas dapat dilihat dalam Tabel 9. Koefisien korelasi antar jenis belanja signifikan, dilihat dari nilai-p yang ditampilkan dibawah angka koefisien korelasi tersebut. Artinya dalam menginterpretasi koefisien model atau elastisitas, tidak dapat secara parsial dengan asumsi *ceteris paribus*. Dengan pengertian lain, kita tidak dapat menginterpretasikan pengaruh belanja barang dan belanja bantuan social untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan asumsi faktor belanja lainnya tetap. Jadi dapat mengacu kembali pengaruh belanja barang dan belanja bantuan sosial tersebut di model (21 dan 23).

Table 8. Hasil Analisis Model Untuk Respons Indeks Pembangunan manusia (IPM)

```
Linear regression                               Number of obs     =         12
                                                F(4, 7)           =      94.04
                                                Prob > F          =     0.0000
                                                R-squared         =     0.9841
                                                Root MSE          =     .00469

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
       LnIPM |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        LnBP |   .0373274   .0112313     3.32   0.013     .0107695    .0638853
             |
        LnBM |
         --. |   .0131223   .0093335     1.41   0.203    -.0089478    .0351925
         L1. |   .0129856   .0069945     1.86   0.106    -.0035539    .0295251
             |
    LnSTotal |  -.0132546   .0038107    -3.48   0.010    -.0222656   -.0042437
       _cons |   3.531361   .0437786    80.66   0.000     3.427841    3.634881
------------------------------------------------------------------------------
```

Table 9. Koefisien Korelasi Antar Jenis Belanja dan Indeks Pembangunan manusia (IPM)

	LnIPM	LnBP	LnBB	LnBM	L.LnBM	LnBBS	LnSTotal
LnIPM	1.0000						
LnBP	0.9737	1.0000					
	0.0000						
LnBB	0.9827	0.9920	1.0000				
	0.0000	0.0000					
LnBM	0.9462	0.9754	0.9741	1.0000			
	0.0000	0.0000	0.0000				
L.LnBM	0.9476	0.9679	0.9436	0.9207	1.0000		
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
LnBBS	0.5544	0.7013	0.6540	0.7299	0.5196	1.0000	
	0.0493	0.0076	0.0153	0.0046	0.0834		
LnSTotal	0.3964	0.5281	0.4532	0.5514	0.4760	0.7012	1.0000
	0.1800	0.0636	0.1199	0.0508	0.1177	0.0076	

Dari Tabel 9 tersebut terlihat bahwa korelasi semua jenis belanja yaitu belanja pegawai (BP), belanja barang (BB), belanja modal (BM), belanja bantuan sosial (BBS) dan belanja subsidi total (STotal) sebenarnya **berkorelasi positif signifikan** dengan indeks pembangunan manusia (IPM) sebagaimana dalam model (20), (21), (22), (23) dan (24).

4.5 Pengaruh Belanja Pelayanan Dasar (SPM) dan Transfer terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Jika kita ingin tahu bagaiamana alokasi belanja berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar (SPM), bukan urusan wajib pelayanan dasar (Non-SPM) serta belanja transfer, seperti diagram alir dalam Gambar 2.2, kita dapat menggunakan model alternatif dalam Tabel 10 (Suraningsih dan Juanda, 2019). Angka sebelah kanan koefisien regresi adalah nilai-p.

Tabel 10. Pengaruh Belanja Pelayanan Dasar (SPM), NonSPM dan Transfer Terhadap IPM dan Komponen IPM

Variabel	LnRLS		LnAHH		LnIPM	
	Koef	Prob	Koef	Prob	Koef	Prob
$LnSPM_{t-1}$	0.006	0.010*	0.001	0.026*	0.005	0.000*
LnBELSUB	0.001 (constraint)		0.002	0.029*	0.001 (constraint)	
$LnDTU_{t-1}$	0.051	0.020*	0.006	0.053*	0.222	0.002*
LnNONSPM	-0.015	0.218	0.014	0.000*	0.012	0.146
C	1.847	0.000*	3.975	0.000*	3.674	0.000*
R-squared	0.8960		0.9829			

Sumber: Suraningsih dan Juanda (2019)

SPM_t = Belanja gabungan kementerian yang terkait dengan SPM tahun ke-t(miliar Rp)
$NONSPM_t$ = Belanja gabungan kementerian yang tidak terkait dengan SPM (miliar Rp)
$BELSUB_t$ = Belanja subsidi pemerintah pusat tahun ke-t (miliar Rp)
$LnDTU_t$ = Dana Transfer Umum tahun ke-t (triliun Rp)
AHH_t = Angka harapan hidup pada tahun ke-t (tahun)
RLS_t = Rata-rata lama sekolah pada tahun ke-t (tahun)

Dari Tabel 10 terlihat bahwa belanja urusan wajib pelayanan dasar (SPM) berpengaruh nyata untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS), angka harapan hidup (AHH) dan indeks pembangunan manusia (IPM) dengan koefisien elastisitas masing-masing sebesar 0.006, 0.001 dan 0.005. Sedangkan belanja yang bukan urusan wajib pelayanan dasar (NONSPM) hanya berpengaruh nyata untuk meningkatkan angka harapan hidup (AHH) dengan koefisien elastisitas yang sangat kecil sekali. Oleh karenanya belanja urusan wajib pelayanan dasar ini sangat berperan untuk pembangunan berkualitas di Indonesia.

Belanja subsidi pemerintah pusat (BELSUB) berpengaruh nyata hanya untuk meningkatkan angka harapan hidup (AHH) dengan koefisien elastisitas sebesar 0.029. Sedangkan belanja dana transfer umum (DTU) berpengaruh nyata untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS), angka harapan hidup (AHH) dan indeks pembangunan manusia (IPM) dengan koefisien elastisitas masing-masing sebesar 0.051, 0.006 dan 0.053. Oleh karenanya belanja dana transfer umum (DTU) ini sangat berperan untuk pembangunan berkualitas di Indonesia.

5. Model Ekonometrika untuk Mengkaji Pengaruh Utang terhadap Belanja yang Berkualitas dan Keberlanjutan Utang

Penggunaan utang **diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui berbagai alokasi belanja untuk kegiatan produktif**. Jika utang mempengaruhi alokasi belanja atau pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif, maka akan **mendorong peningkatan output**, dan akhirnya akan **meningkatkan potensi penerimaan pemerintah** yang dapat digunakan untuk **membayar utang dan bunganya**, sebagaimana dalam diagram alir di Gambar 3.a. Dalam Gambar tersebut bagaimana pengaruh utang terhadap belanja urusan pelayanan dasar (SPM), NON-SPM, dana transfer dan belanja subsidi, sebagaimana klasifikasi mirip dalam Gambar 2.2.

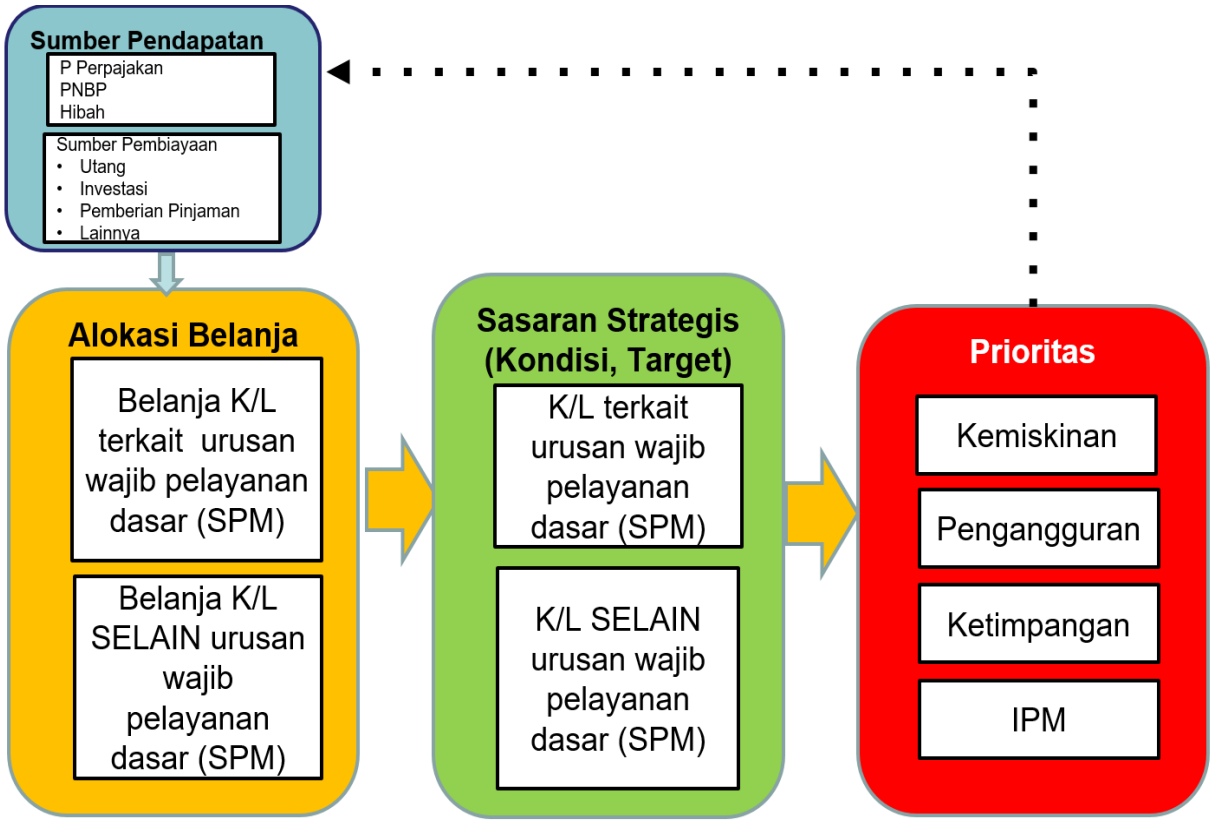

Gambar 3a. Kerangka Acuan Peranan Utang Dalam Pembangunan Berkualitas, Melalui Belanja Urusan Wajib Pelayanan dasar (SPM)

5.1 Pengaruh Utang terhadap Belanja yang Berkualitas

Untuk mengevaluasi apakah utang dialokasikan untuk belanja kegiatan produktif, kita dapat menggunakan model alternatif dalam Tabel 11 dan Tabel 12 (Suraningsih dan Juanda, 2019). Angka sebelah kanan koefisien regresi adalah nilai-p. Tabel 11 mendeskripsikan pengaruh utang terhadap belanja urusan pelayanan dasar (SPM) dan belanja subsidi.

Tabel 11. Pengaruh Utang Terhadap Belanja Urusan Pelayanan Dasar (SPM) dan Subsidi

Variabel	LnSPM		LnBELSUB	
	Koef	Prob	Koef	Prob
LnUTANGPEMERINTAH	2.483	0.084*	0.148	0.831
LnPAJAK	-0.082	0.967	1.082	0.504
LnPNBP	0.501	0.592	1.322	0.009***
LnPMTB	7.744	0.040**	-1.915	0.310
LnHIBAH	0.737	0.148	-0.058	0.811
C	-83.956	0.045**	17.998	0.368
R-squared	0.9704		0.7861	

Sumber : Suraningsih dan Juanda (2019)

Keterangan :

$UTANGPEMERINTAH_t$ = Total utang pemerintah tahun ke-t (miliar USD)
$PAJAK_t$ = Penerimaan negara dari pajak pada tahun ke-t (triliun Rp)
$PNBP_t$ = Penerimaan negara dari bukan pajak pada tahun ke-t (triliun Rp)
$HIBAH_t$ = Penerimaan negara dari hibah pada tahun ke-t (triliun Rp)
$PMTB_t$ = Penanaman modal tetap bruto pada tahun ke-t (Rp)

Tabel 12. Pengaruh Utang Terhadap Belanja Bukan Urusan Pelayanan Dasar (NON SPM) dan Dana Transfer Umum (DTU)

Variabel	LnNON SPM		LnDTU	
	Koef	Prob	Koef	Prob
LnUTANGPEMERINTAH	0.905	0.015**	0.338	0.037**
LnPAJAK	-1.327	0.126	0.102	0.818
LnPNBP	0.425	0.093*	0.266	0.047**
LnPMTB	3.003	0.008***	0.895	0.101
LnHIBAH	0.231	0.073*	-0.022	0.697
C	-30.121	0.021**	-11.263	0.059*
R-squared	0.9639		0.9759	

Sumber: Suraningsih dan Juanda (2019)

Dari Tabel 11 dan Tabel 12 terlihat bahwa utang pemerintah berpengaruh nyata untuk meningkatkan belanja urusan wajib pelayanan dasar (SPM), belanja yang tidak terkait

dengan pelayanan dasar (NONSPM) dan dana transfer umum (DTU) dengan koefisien elastisitas masing-masing sebesar 2.483, 0.905 dan 0.338. Alokasi belanja ketiga kategori ini sangat berperan dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS), angka harapan hidup (AHH) dan indeks pembangunan manusia (IPM) sebagaimana diuraikan dalam SubBab 4.5. Oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa penggunaan utang selama ini digunakan untuk kegiatan yang produktif sesuai sasaran pembangunan berkualitas yang ada di APBN. Jadi untuk saat ini utang sangat berperan untuk pembangunan berkualitas di Indonesia.

Untuk mengevaluasi bagaimana pengaruh utang terhadap jenis belanja, dan dana transfer dapat dilihat dalam Tabel 13. Sebagaimana klasifikasi yang dijelaskan dalam Gambar 2.3 dan lebih lengkapnya lagi dapat dilihat dalam Gambar 3b, terlihat bahwa melalui mekanisme transmisi, utang mempengaruh jenis belanja dan dana transfer, kemudian selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan adalah data selama periode Tahun 1981-2017. Dengan data yang cukup panjang ini digunakan realisasi belanja riil yang dikoreksi dengan *consumer price index (cpi)* dari World Bank dan sasarannya hanya ke pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan). Metode pendugaan yang digunakan adalah metode 2SLS *robust*.

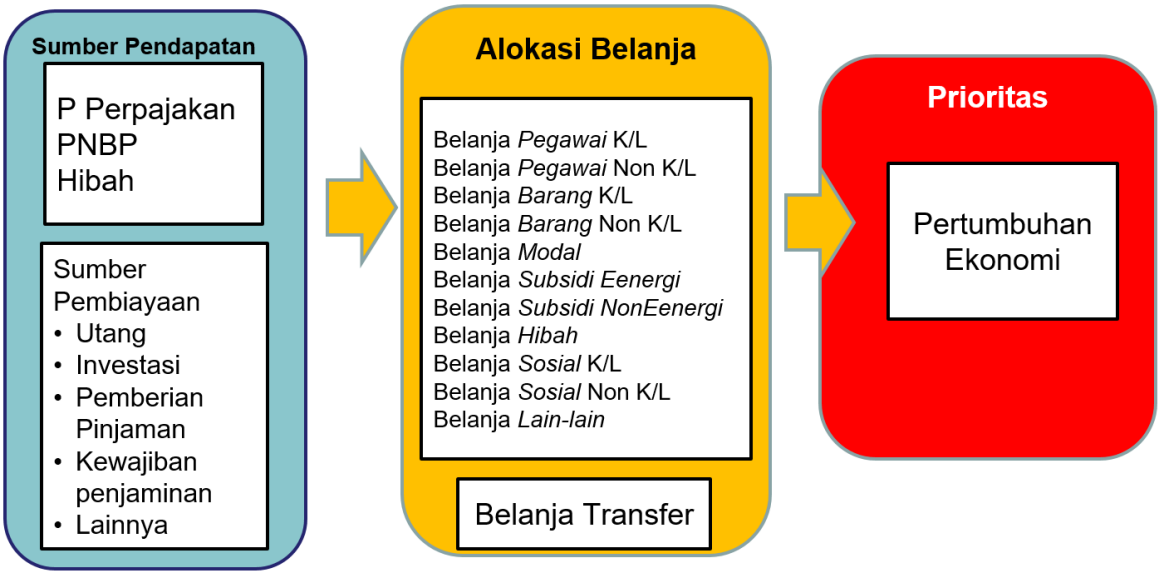

Gambar 3.b Kerangka Acuan Peranan Utang Dalam Pembangunan Berkualitas, Melalui Berbagai Jenis Belanja dan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, masalah multikolinearitas merupakan masalah serius karena simpangan baku koefisiennya sangat besar sehingga dugaan koefisien regresinya tidak signifikan padahal korelasi antara variable bebas tersebut dengan variable respons Y sangat tinggi dan signifikan, sehingga akibatnya sulit memisahkan pengaruh masing-masing peubah bebas. Salah satu cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas adalah transformasi terhadap semua variable dalam model dalam bentuk pembedaan pertama (*first difference*) untuk data deret waktu. Walaupun antara variable bebas, misalnya X_{2t} dengan X_{3t} berkolinearitas tinggi, namun antara $(X_{2t} - X_{2t-1})$ dengan $(X_{3t} - X_{3t-1})$ seringkali tidak berkorelasi (Juanda 2009).

Dalam Tabel 13.a dan Tabel 13.b, variabel D.Y maksudnya adalah pembedaan pertama (*first difference*) dari Y atau ΔY_t. Jika model dalam bentuk pembedaan pertama tersebut tanpa konstanta intersep, maka koefisien modelnya sama dengan koefisien model aslinya. Akan tetapi model dugaan dalam Tabel 13.a dan Tabel 13.b memasukkan konstanta intersep sebagai model terbaik. Oleh karena itu, interpretasi koefisien dari variabel bebas (β) dalam tabel tersebut adalah sebagai berikut

$$\beta = \frac{\partial.\Delta Yt}{\partial.\Delta Xt} = \frac{\partial.(LnYt - Ln\ Y(t-1))}{\partial.(LnXt - LnX(t-1))} = \frac{Growth.Yt - Growth.Y(t-1)}{Growth.Xt - Growth.X(t-1)} \quad (39)$$

Tabel 13.a Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Pegawai Riil

Variabel	D.LnPegawai	
	Robust Koefisien	p-value
D.growth	.00129	0.820
$D.Utang_{t-1}$	.00099	0.630
$D.Utang_{t-1}$.Djkw	.00232	*0.049
D.LnFDI	-.08747	*0.018
D.LnPMTB	.37722	**0.003
D.LnPNBP	.05537	0.292
D.LnPNP	.34814	0.086
Cons	.00796	0.712
R-squared	0.562	
Prob (Chi2-Statistic)	0.000	

Sumber: Hutaria, Juanda, Purnamadewi (2019), diolah

Keterangan : ***Signifikan pada taraf nyata 1% *(P-value two tail).*

Tabel 13.b Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Riil

Variabel	D.LnModal	
	Robust Koefisien	***p-value two tail***
D.LnGDP	2.8350	0.218
$D.Utang_{t-1}$	-.00852	0.136
$D.Utang_{t-1}$.Djkw	.00836	***0.000
D.LnFDI	-.21194	0.143
D.LnPMTB	-.90815	0.141
D.LnPNBP	.24771	0.156
D.LnPNP	.57892	0.273
Cons	-.13652	0.073
R-squared	0.3382	
Prob (Chi2-Statistic)	0.000	

Sumber: Hutaria, Juanda, Purnamadewi (2019), diolah
Keterangan : **Signifikan pada taraf nyata 1%, *Signifikan pada taraf nyata 5%, *(P-value two tail).*

Tabel 13.c Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa riil (TKDD)

Variabel	LnTKDD	
	Robust Koefisien	***p-value***
LnGDP	.48811	0.577
$Utang_{t-1}$	.00785	*0.051
$Utang_{t-1}$.Djkw	.01659	***0.009
LnFDI	.38392	***0.000
LnPMTB	-.45714	0.446
LnPNBP	.54973	***0.000
LnPNP	.64889	***0.005
Cons	-13.00477	0.073
R-squared	0.9799	
Prob (Chi2-Statistic)	0.000	

Sumber: Hutaria, Juanda, Purnamadewi (2019), diolah
Keterangan : **Signifikan pada taraf nyata 1%, *Signifikan pada taraf nyata 5%, *(P-value two tail).*

$Pegawai_t$ = belanja pegawai pemerintah pusat riil pada periode t (Milyar Rp)
$Modal_t$ = belanja modal pemerintah pusat riil pada periode t (Milyar Rp)
$TKDD_t$ = belanja transfer ke daerah dan dana desa riil pada periode t (Milyar Rp)
$Utang_{t-1}$ = rasio utang pemerintah terhadap GDP pada periode t-1 (%)
D_{jkw} = Dummy pemerintahan (1= pemerintahan periode 2014-2017, 0=pemerintahan sebelum periode 2014-2017)
PNP_t = penerimaan perpajakan pemerintah pusat riil pada periode t (Milyar Rp)
$PNBP_t$ = penerimaan bukan pajak pemerintah pusat riil pada periode t (Milyar Rp)
$growth_t$ = pertumbuhan ekonomi pada periode t (%).
GDP_t = *Gross Domestic Product* atas dasar harga konstan pada periode t (Rp)
C_t = Konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan pada periode t (Rp)

$PMTB_t$ = Pembentukan Modal Tetap Bruto atas dasar harga konstan pada periode t (Rp)
FDI_t = *Foreign Direct Investment* pada periode t (USD)
$Ekspor_t$ = Nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan pada periode t (Rp)
$Impor_t$ = Nilai impor barang dan jasa atas dasar harga konstan pada periode t (Rp)

Tabel 13.a menunjukkan bahwa pengaruh interaksi antara variabel utang dengan periode pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja pegawai. Artinya, pengaruh utang terhadap belanja pegawai tidak sama antara sebelum dan sesudah tahun 2014. Pengaruh utang sebelum pemerintahan tahun 2014 tidak signifikan terhadap belanja pegawai. Sedangkan setelah pemerintahan tahun 2014, pengaruh utang signifikan terhadap belanja pegawai dengan koefisien "elastisitas" sebesar 0.232. Artinya peningkatan pertumbuhan utang sebesar 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan belanja pegawai sebesar 0.232%, asumsi *ceteris paribus*. Peningkatan belanja pegawai pada pemerintahan setelah Tahun 2014 karena ingin meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, terutama melalui anggaran pendidikan dan kesehatan. Jika kita bandingkan dengan pengaruh utang terhadap belanja modal (Table 13.b) dan terhadap belanja transfer ke daerah dan dana desa (Table 13.c), koefisien interaksi antara variabel utang dengan periode pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan jauh lebih besar terhadap belanja modal (0.836) dan belanja TKDD (1.659), dibandingkan pengaruhnya terhadap pegawai (0.232).

Tabel 13.b menunjukkan bahwa pengaruh utang pemerintah sebelum Tahun 2014 tidak signifikan terhadap belanja modal. Akan tetapi setelah Tahun 2014, pengaruh utang pemerintah sangat signifikan terhadap belanja modal dengan koefisien "elastisitas" sebesar 0.836. Artinya peningkatan pertumbuhan utang sebesar 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan belanja modal sebesar 0.836%. Peningkatan belanja modal pada pemerintahan setelah Tahun 2014 karena ingin membangun infrastruktur guna mendukung pengembangan perekonomian dan kemudahan aksesibilitas, misalnya APBN 2020 membutuhkan anggaran infrastruktur sebesar Rp423.3 Trilyun untuk membangun infrastruktur dan daerah terpencil.

Tabel 13.c menunjukkan bahwa pengaruh utang pemerintah sebelum tahun 2014 berpengaruh signifikan terhadap belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dengan

koefisien "elastisitas" 0.785. Sedangkan sesudah tahun 2014 utang pemerintah berpengaruh signifikan dalam menaikkan jenis belanja modal dengan nilai koefisien "elastisitas" sebesar 2.444, penjumlahan 0.785 dan 1.659. Dari Table 13 tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunakan utang mulai periode 2014 digunakan terutama dengan urutan koefisien "elastisitas", untuk menaikkan belanja TKDD (2.444), belanja modal (0.836) dan belanja pegawai (0.232). Dalam beberapa tahun terakhir ini total belanja TKDD sudah lebih dari sepertiga APBN, misalnya APBN 2020 membutuhkan anggaran TKDD sebesar Rp856.9 Trilyun dari total belanja Rp2,540.4 Trilyun. Besarnya anggaran TKDD ini karena dalam era otonomi daerah sudah banyak urusan yang sudah dilimpahkan ke pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, dan juga desa.

Faktor penerimaan negara dari pajak (PNP) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap belanja TKDD dengan koefisien "elastisitas" masing-masing sebesar 0.648 dan 0.549. Penerimaan negara dari pajak (PNP) juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan belanja pegawai dengan nilai-p sebesar 0.086 untuk uji dwi-arah. Jika hipotesisnya bahwa kenaikan penerimaan pajak akan meningkatkan belanja pegawai (uji eka-arah) maka nilai-p sebenarnya sebesar 0.043. Hasil analisis dalam Tabel 13.a memperlihatkan bahwa peningkatan pertumbuhan pajak sebesar 1 % akan meningkatkan pertumbuhan belanja pegawai sebesar 0.348%, asumsi *ceteris paribus.*

5.2 Model Keberlanjutan Utang

Pada hakikatnya, utang diperlukan untuk menutupi defisit anggaran karena total belanja yang lebih besar dari total penerimaannya. Dalam model makroekonomi dari sisi *agregat demand*, dijelaskan bahwa jika belanja pemerintah meningkat maka output nasional atau Y= C+ I + G + (X-M), juga akan meningkat. Tabel 14 menjelaskan bagaimana pengaruh belanja modal, belanja pegawai dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) terhadap peningkatan atau pertumbuhan output nasional.

Tabel 14 mendeskripsikan suatu model untuk mengkaji pengaruh jenis belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Model diestimasi pada data pembedan pertama (*first difference*) untuk mengatasi permasalahan multikolinearitas.

Tabel 14 Hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Output Ekonomi (D.LnGDP)

Variabel	Koefisien	P-value
D.LnModal	0.01693	*0.052
D.LnPegawai	0.00100	Constrained
D.LnTKDD	0.02318	0.264
D.LnC	0.52775	**0.000
D.LnPMTB	0.24911	**0.000
D.LnEkspor	0.12985	**0.002
D.LnImpor	-0.12927	**0.003
Cons	0.00665	0.222
Prob(F-Statistic)	0.000	

Sumber: Hutaria, Juanda, Purnamadewi (2019), diolah

Keterangan : *** Signifikan pada taraf nyata 1%, **Signifikan pada taraf nyata 5%, *Signifikan pada taraf nyata 10% *(P-value two tail).*

Pengaruh belanja modal signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan koefisien "elastisitas" sebesar 0.0169. Artinya jika terjadi peningkatan pertumbuhan belanja modal sebesar 1% maka akan menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.0169% (dari pertumbuhan sebelumnya), asumsi *ceteris paribus*.

Jika dilakukan uji eka-arah, maka pengaruh belanja TKDD signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien "elastisitas" sebesar 0.0232 dengan nilai-p sebesar 0.132. Artinya jika terjadi terjadi peningkatan pertumbuhan belanja TKDD sebesar 1% maka akan menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.0232% (dari pertumbuhan sebelumnya). Pengaruh postitif dari pertumbuhan belanja TKDD terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa kebijakan transfer secara umum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi indonesia.

Penggunaan utang yang ditransmisikan melalui berbagai jenis belanja pemerintah dalam jangka waktu yang panjang dapat mempengaruhi kondisi keberlanjutan utang suatu negara. Ada beberapa pemahaman mengenai definisi utang yang berkelanjutan. Namun, pada prinsipnya utang yang berkelanjutan diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban utang tanpa menyebabkan kegagalan bayar (solvabilitas). Konsep kebelanjutan utang erat kaitannya dengan kondisi anggaran primer. Anggaran primer, yang didefinisikan sebagai seluruh pendapatan negara dikurangi dengan belanja kecuali belanja bunga utang, menjadi salah satu indikator apakah suatu negara memiliki kemampuan bayar

yang baik atau tidak.

Selain dilihat dari penggunaan utang terhadap jenis belanja pemerintah, seperti yang telah dibahas, analisis keberlanjutan utang pemerintah Indonesia selama periode 1981-2017 dapat dianalisis melalui *fiscal reaction function*. Apabila pengaruh utang terhadap keseimbangan primer memiliki nilai koefisien yang positif dan signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa utang pada periode tersebut berkelanjutan. Namun apabila pengaruh utang terhadap keseimbangan primer memiliki nilai koefisien yang negatif maka utang pada periode tersebut diindikasikan berada pada posisi utang yang tidak berkelanjutan. Tabel 15 menyajikan dugaan model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan primer dengan metode *robust*.

Tabel 1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keseimbangan Primer Indonesia (LnPB)

Variabel	Koefisien	Pvalue
$Utang_{t-1}$	0.01125	*0.022
LnBelanja	-3.65856	*0.033
$LnPB_{t-1}$	0.55883	**0.001
growth	0.03258	***0.000
LnRev	3.03650	*0.060
Cons	8.22473	**0.019
R-Squared	0.9416	
Prob(F-Statistic)	0.0000	

Sumber: Hutaria, Juanda, Purnamadewi (2019), diolah

Keterangan : ***Signifikan pada taraf nyata 1%, **Signifikan pada taraf nyata 5%, *Signifikan pada taraf nyata 10% *(P-value two tail).*

PB_t : keseimbangan primer pada periode t (Milyar Rp)
$utang_{t-1}$: rasio utang pemerintah terhadap GDP pada periode t-1 (%)
$Belanja_t$: belanja pemerintah pada periode t (Milyar Rp)
$growth_t$: pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode t (%)
PB_{t-1} : *lag* dari keseimbangan primer (Milyar Rp)
Rev_t : penerimaan negara yang berasal dari pajak dan nonpajak pada periode t (Milyar Rp)

Tabel 15 menunjukkan bahwa utang pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keseimbangan primer Indonesia pada tahun berikutnya, dengan elastisitas sebesar 1.125. Jadi pengaruhnya relative elastis, artinya jika utang pemerintah naik 1% maka keseimbangan primer tahun berikutnya akan meningkat sebesar 1.125%. Dari hasil dugaan koefisien ini menunjukan bahwa utang pemerintah Indonesia menuju ke arah yang berkelanjutan; dengan pengertian lain bahwa utang digunakan untuk kegiatan yang produktif yang mampu menggerakan perekonomian dengan peningkatan aktivitas ekonomi

yang dapat mendorong peningkatan pendapatan negara. Hal ini juga diperkuat dari perkembangan keseimbangan primer pada Gambar 4. Meskipun dalam periode 2012-2017 mengalami posisi defisit keseimbangan primer, namun terdapat kecenderungan nilai defisit yang menurun atau mengarah ke positif terutama selama periode 2015-2017.

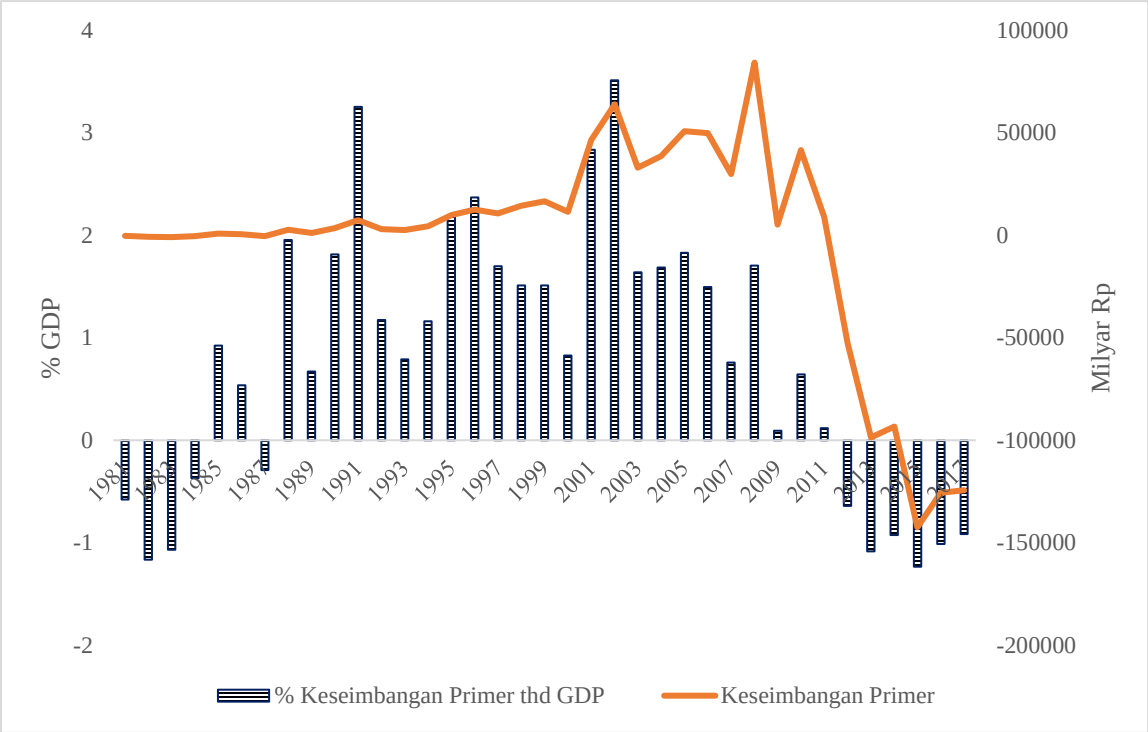

Sumber : Kementerian Keuangan 2018

Gambar 1. Keseimbangan primer Indonesia 1981-2017

Faktor lain yang signifikan mempengaruhi keseimbangan primer adalah total belanja negara, pertumbuhan dan total penerimaan negara. Pengaruh negatif belanja negara disebabkan karena belanja merupakan komponen pengurang dari keseimbangan primer sehingga ketika belanja semakin tinggi akan menurunkan nilai keseimbangan primernya. Pengaruh belanja negara terhadap keseimbangan primer Indonesia yakni sebesar -3.65 artinya ketika belanja negara mengalami peningkatan sebesar 1% maka keseimbangan primer akan menurun sebesar 3.65% asumsi *ceteris paribus*. Sedangkan elastisitas pendapatan negara baik yang berasal dari pajak dan nonpajak sebesar 3.04. *Lag* dari keseimbangan primer dapat mempengaruhi signifikan nilai keseimbangan primer itu sendiri seperti model estimasi *fiscal reaction function* yang digunakan Chandia (2013). Koefisien elastisitas dari pertumbuhan ekonomi cukup elastis sebesar 3.258. Artinya jika terjadi

pertumbuhan 1% maka akan mendorong peningkatan keseimbangan primer sebesar 3.258%.

6. Penutup

APBN berkualitas adalah ***APBN yang mengoptimalkan pendapatan, dan belanjanya dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan nasional yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu (realisasi pendapatan dan belanja), transparan dan akuntabel.*** Selama ini alokasi belanja dalam APBN telah diupayakan untuk pemenuhan 4 sasaran pembangunan yang berkualitas, yaitu penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan antar wilayah serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan untuk penurunan ketimpangan antar individu (Gini Ratio) belum dapat diperbaiki dari alokasi belanja pemerintah pusat. Hal ini karena ketimpangan antar individu dipengaruhi juga oleh alokasi belanja masing-masing pemerintah daerah. Sekitar sepertiga APBN ditransfer ke daerah dan desa, dan masuk ke APBD. Begitu juga sekitar sepertiga belanja pusat dibelanjakan di daerah. Jadi kinerja pembangunan sangat tergantung dari kinerja pembangunan daerah.

Salah satu cara mengukur APBN berkualitas, dapat dilihat dari apakah belanja tersebut dialokasikan kepada belanja-belanja yang produktif untuk mencapai sasaran pembangunan berkualitas. Jika untuk mencapai empat sasaran pembangunan berkualitas dibutuhkan total belanja yang lebih besar dari target pendapatan maka harus mencari sumber pembiayaan, diantaranya utang. Keberkelanjutan utang akan terjadi jika penggunaan utang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui berbagai alokasi belanja untuk kegiatan produktif. Jika utang mempengaruhi alokasi belanja atau pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif, maka akan mendorong peningkatan output, dan akhirnya akan meningkatkan potensi penerimaan pemerintah yang dapat digunakan untuk membayar utang dan bunganya.

Pustaka

Chandia, J. 2013. An Analysis of Debt Sustainability in the Economy of Pakistan. *Procedia Economics and Finance*. 133 – 142.

Heriwibowo D, Juanda B, Hadi S. 2016. "The Measurement of Local Government Spending Quality with Indicators of Sustainable Local Development in Indonesia." *Journal of Economics and Sustainable Development*. Vol.7, No.4:75-88.

Hutaria T, Juanda B, Purnamadewi Y. 2019. "The Effect of Government Debt on Indonesia's Economics Growth." *International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology*. 6(5): 125-130. doi: doi.org/10.32628/IJSRSET196523.

Juanda B, Halim A, Azis A, Kaiwai HZ. 2013. *Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah*. Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: 115 hal.

Juanda B, Heriwibowo D. 2016. *Konsolidasi Desentralisasi Fiskal Melalui Reformasi Kebijakan Belanja Daerah Berkualitas*. Vol.7, No.4: 15-28.

Juanda B, Paddu AH, Robiani B, Kaiwai HZ. 2014. "Kajian Atas Indikator Standar Pelayanan Nasional di Bidang Layanan Publik Dasar yang Relevan Dengan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus." *Jurnal Ekonomi dan kebijakan Publik*: 72 hal.

Juanda B, Sidik M, Qibthiyyah RM. 2012. *Reformulasi DAU Untuk Memperkuat Peran Sebagai Equalization Grant*. Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: 96 hal.

Listiana Y, Juanda B, Mulatsih S. 2016. "Determinant of Local Expenditure Quality Model and Relation with Local Development in East Java. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 17(2): 176-192.

Wahyuni S, Juanda B, Fahmi I. 2016. "Kualitas Belanja Daerah dan Hubungannya Dengan Kinerja Pembangunan Di Provinsi Banten." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. 6(2): 16-31.